

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan dari setiap bisnis di seluruh dunia adalah untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dibanding usaha yang dilakukan, walaupun hasil yang diperoleh dan menjadi orientasi tidak semuanya adalah hasil dalam bentuk laba. Secara sederhana, produktivitas adalah hasil perbandingan antara keluaran yang dihasilkan perusahaan dengan masukan yang dihabiskan oleh perusahaan guna memperoleh keluaran tersebut. Perusahaan yang produktif adalah yang memiliki hasil perbandingan tersebut yang bernilai lebih dari 1. Peningkatan produktivitas adalah salah satu cara perusahaan untuk dapat tetap bertahan di persaingan bisnis yang semakin ketat di masa globalisasi di mana batas-batas antar negara semakin lebur dan semakin meluasnya kompetisi. Vilanovadalam Li<sup>1</sup> menjelaskan bahwa lima dimensi persaingan dalam persaingan perusahaan adalah : kinerja keuangan, kualitas produk atau jasa, produktivitas, inovasi dan reputasi. Produktivitas merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa besar efektivitas perusahaan tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Oleh karena itu, produktivitas sangat

---

<sup>1</sup>Li Sun dan Marty Stuebs, "Corporate Social Responsibility and Firm Productivity: Evidence from the Chemical Industry in the United States," *Journal Business Ethics* , Vol. 118 (USA, 2013), h. 251–263.

dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan harus meminimalisir masukan yang ada dengan keluaran yang sama atau meningkatkan keluaran dengan masukan yang sama. Masukan di sini dapat meliputi unsur produksi, waktu ataupun fasilitas. Dalam perusahaan yang menghasilkan keluaran berupa barang akan mudah dalam perhitungan produktivitasnya karena hasil keluaran dapat diketahui jelas dari unit yang dihasilkan serta masukan dari aktivitas produksinya. Namun tidak demikian jika dibahas dalam perusahaan jasa ataupun perusahaan nirlaba. Kesulitan akan muncul jika membahas produktivitas di dua bidang ini karena keluaran yang dihasilkan hanya dapat terlihat dalam sisi produktivitas keuangan di perusahaan jasa dan kesulitan lain di perusahaan nirlaba adalah tidak adanya pendapatan yang sering diidentikan sebagai keluaran. Sayangnya, kekurangan ini yang membuat produktivitas di perusahaan jasa dan nirlaba menjadi kurang mewakili produktivitas sebenarnya jika hanya dilihat dari sisi keuangannya saja. Karena, operasi yang dilakukan perusahaan jasa dan nirlaba yang utama adalah pelayanan yang tidak berwujud sehingga sulit diukur.

Modal intelektual merupakan pokok dari berbagai hasil kecanggihan yang ada di dunia ini yang terlupakan. Orang-orang memfokuskan pada bentuk fisik dari kecanggihan tersebut saja tanpa memberi sedikit perhatian terhadap apa yang dapat menghasilkan kecanggihan tersebut. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas perusahaan, salah satunya adalah modal yang dimiliki perusahaan. Selain modal berupa saham dan uang, yang tidak kalah penting adalah modal intelektual. Suatu modal yang tidak dapat dilihat namun

dapat dirasakan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Sebuah aset yang sulit diukur namun sangat bernilai.

Modal intelektual telah disepakati dalam *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* pada Juni 1999 sebagai aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan dan menghadapi persaingan, yaitu dari dua jenis aset tak berwujud: modal struktural dan modal manusia.<sup>2</sup> Karena baru disadari keberadaannya, pengukuran modal intelektual menjadi belum jelas. Belum ada aturan khusus yang membahas perlakuan modal intelektual. Namun, berdasarkan sifatnya yang tidak nyata, modal intelektual dapat diperlakukan seperti halnya *goodwill*, yaitu isi dari pos aset tak berwujud. Guthrie, dan IFA dalam Ulum menjelaskan bahwa akuntansi tradisional belum mampu menyajikan informasi tentang identifikasi dan pengukuran aset tak berwujud dalam organisasi, khususnya organisasi yang berbasis pengetahuan<sup>3</sup>. Jenis aset tak berwujud seperti kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, model-model simulasi, sistem administrasi dan komputer tidak diakui dalam model pelaporan manajemen dan keuangan tradisional. Dalam praktiknya pun terdapat aset tak berwujud seperti kepemilikan merk, paten dan *goodwil* yang masih jarang dipaorkan di laporan keuangan. Kenyatannya, IAS 38 tentang aset tak berwujud melarang pengakuan merek yang diciptakan secara internal, logo, judul publikasi, dan daftar pelanggan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ihyaul Ulum, “*Intellectual Capital*,”(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)h. 21

<sup>3</sup>Ibid, h.2.

<sup>4</sup>Ibid, h.3.

Di Indonesia, perlakuan modal intelektual dapat dikaitkan dengan PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aset tidak berwujud yang menyebutkan bahwa aset tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administrasi. Hal ini membuktikan bahwa modal intelektual sudah mulai sedikit mendapat perhatian walaupun hanya secara implisit. Keberadaan modal intelektual yang termasuk dalam aset tidak berwujud tidak dapat disepelekan.

Pentingnya aset tak berwujud tersebut dibuktikan dalam laporan *Brand Finance* yang menunjukkan eksistensi *brand* yang dimiliki Indonesia di kawasan ASEAN. Galih Rangka menjelaskan bahwa brand Indonesia memiliki posisi yang cukup baik di dunia global pada *brand* nya berdasarkan laporan *Brand Finance*, yaitu di peringkat 28. Sedangkan dalam wilayah ASEAN, Indonesia ada di bawah Singapura. Dan Indonesia berada di antara Top 20 untuk investasi, di atas beberapa negara Eropa.<sup>5</sup> Laporan tersebut membuktikan bahwa aset tak berwujud tersebut harus diakui secara serius karena memberikan pengaruh terhadap posisi perusahaan di dunia persaingan usaha. Menurut Samir Dixit yang dikutip dalam Joko Sugianto<sup>6</sup>,

Nilai tidak berwujud merupakan aset penting bagi Indonesia, di mana hal ini menjadi penting mengingat komposisi Indonesia terhadap nilai perusahaan tidak sejalan dengan rata-rata global yang dilaporkan oleh

---

<sup>5</sup>Ri'atul Mahmudah, 100 Brand Diumumkan Sebagai Merek Paling Bernilai Tahun 2013, 2013, h.1 (<http://swa.co.id/business-research/100-brand-diumumkan-sebagai-merek-paling-bernilai-tahun-2013>).

<sup>6</sup>Joko Sugiartono, 10 Isu Strategis dalam Manajemen SDM, 2016 (<http://swa.co.id/business-strategy/management/10-isu-strategis-dalam-manajemen-sdm>).

persentase yang sangat tinggi dari nilai yang dihasilkan perusahaan. Kami melihat ada kebutuhan besar perusahaan terhadap pemahaman nilai aset tidak berwujud.

Huber Saint–Onge dari *Canadian Imperial Bank of Commerce* dan Leif Edvinsson dari Skandia membagi modal intelektual menjadi tiga unsur yaitu : modal manusia, modal struktural dan modal pelanggan.<sup>7</sup> Salah satu isu yang masih eksis di dunia manajemen SDM menyangkut modal manusia adalah manajemen talenta yang juga masih menjadi fokus banyak perusahaan di Indonesia. Tantangan yang ada saat ini salah satunya kehadiran Gen Y (generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000) dengan segala karakteristiknya di zaman VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*).<sup>8</sup>

Penelitian–penelitian mengenai modal intelektual sudah cukup banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan hasilnya pun beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suhendah<sup>9</sup>, Hong, Plowman dan Hancock<sup>10</sup>, Yudhanti dan Shanti<sup>11</sup>, dan Mehralian,<sup>12</sup> menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap produktivitas. Namun hasil yang kontradiktif muncul pada penelitian yang dilakukan Ulum<sup>13</sup>, Kamath<sup>14</sup>,

---

<sup>7</sup>Thomas A. Stewart, *Intellectual Capital*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002) h.78.

<sup>8</sup>Irvandi Ferizal, dalam Joko Sugiwarsono, “10 Isu Strategis dalam Manajemen SDM,” (<http://swa.co.id/business-strategy/management/10-isu-strategis-dalam-manajemen-sdm>).

<sup>9</sup>Rousilita Suhendah, “Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Profitabilitas, Produktivitas dan Penilaian Pasar pada Perusahaan yang *Go Public* di Indonesia pada Tahun 2005 – 2007”, Simposium Nasional Akuntansi 15, 2012.

<sup>10</sup>Hong Pew Tan, David Plowman dan Phil Hancock, “Intellectual Capital and Financial Returns of Companies”, *Journal of Intellectual Capital* Vol. 8 No. 1, 2007. , h..76-95.

<sup>11</sup>Cecilia Bintang Hari Yudhanti dan Josepha C. Shanti, “Intellectual Capital dan Ukuran Fundamental Kinerja Keuangan Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 13, No. 2, November 2011: 57-66.

<sup>12</sup>Gholamhossein Mehralian, dkk, “Intellectual Capital and performance in Iranian pharmaceutical industry”, *Journal of Intellectual Capital* Vol. 13 No. 1. 2012, h..138-158.

<sup>13</sup>Ihyaul Ulum, “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”, 2007.

dan Ka Yin Yu, dkk<sup>15</sup> yang menunjukkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendah<sup>16</sup> menjelaskan bahwa dari tiga variabel dalam modal intelektual yakni modal fisik, modal manusia, dan modal struktural, hanya modal manusia dan modal struktural yang berpengaruh pada produktivitas. Mehralian, dkk<sup>17</sup> yang meneliti pengaruh modal intelektual dengan kinerja perusahaan di industri farmasi Iran menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara modal manusia dengan produktivitas dan modal fisik lebih berpengaruh terhadap kinerja dibandingkan dengan modal manusia dan modal struktural. Kamath<sup>18</sup> melakukan penelitian pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan dan penilaian pasar yang menunjukkan bahwa komponen modal intelektual (modal manusia, modal struktural dan modal karyawan) tidak ada yang mempengaruhi produktivitas perusahaan.

Salah satu kendala dalam modal intelektual adalah belum jelasnya keberadaan modal intelektual dalam laporan keuangan perusahaan. Pengukuran yang tepat akan modal tak berwujud ini belum dapat ditetapkan.<sup>19</sup> Inilah yang menyebabkan belum seragamnya pengukuran yang dilakukan perusahaan terhadap modal intelektual.

---

<sup>14</sup>G. Bharathi Kamath. "Impact of Intellectual capital on Financial Performance and Market Valuation of Firms in India", *International Letters of Social and Humanistic Science* Vol. 48, 2015, h. 107-122.

<sup>15</sup>Ka Yin Yu, dkk, "An Empirical Study of the Impact of Intellectual Capital Performance on Business Performance", *The 7<sup>th</sup> International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning*, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2010.

<sup>16</sup>Rousilita Suhendah, loc.cit.

<sup>17</sup>Gholamhossein Mehralian, dkk, op.cit.

<sup>18</sup>G. Bharathi Kamath, op.cit.

<sup>19</sup>Ihyaul Ulum, op.cit, h.2.

Disamping modal intelektual yang berada di dalam lingkungan perusahaan, isu yang masih sering diperbincangkan di dunia bisnis yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai serius akan tanggung jawab sosial mereka. Selain memang sudah kewajiban dalam kehidupan bisnis yang melibatkan berbagai pihak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.4 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, para pelaku usaha juga sudah menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membantu mereka dalam mempertahankan eksistensi mereka di masyarakat. Dari survei "*The Millenium Poll on CSR*" yang dilakukan *Environics International* (Toronto), *Conference Board* (New York) dan *Prince of Wales Business Leader Forum* ( London) terkait tanggung jawab sosial dalam membentuk opini dan reputasi perusahaan, menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan paling berperan membentuk reputasi perusahaan. Kemudian 50 % responden berpendapat tidak akan membeli produk yang dihasilkan perusahaan yang tidak berkomitmen terhadap CSR dan akan berbicara kepada orang lain mengenai reputasi jelek perusahaan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Chrysanti Hasibuan-Sedyono,"Etika Bisnis, Corporate Social Responsibility (CSR), dan PPM,"  
”(https://goodcsr.wordpress.com/about/etika-bisnis-corporate-social-responsibility-csr-dan-ppm/)

Perusahaan tidak akan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya tanpa pengaruh lingkungan. Pada masa dimana pemanasan global menjadi isu yang dihadapi di seluruh dunia, *shareholders* (pemegang saham) bukan lagi menjadi orientasi utama yang harus dimiliki perusahaan namun juga *stakeholders* (pemangku kepentingan). Pemangku kepentingan di sini dapat berasal dari dalam perusahaan seperti karyawan maupun dari luar perusahaan seperti konsumen, pemerintah, pemasok dan masyarakat. Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang menjadi sorotan utama ketika berbicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, mengingat merekalah yang paling sering bersinggungan dengan kegiatan perusahaan dan tidak memperoleh manfaat langsung seperti halnya karyawan. Ketika perusahaan beroperasi tidak sesuai etika dan standar yang berlaku maka masyarakat sekitar lah yang merasakan dampak negatif terbesar. Seperti kasus Freeport Indonesia yang memegang hak izin penambangan emas, silver, molybdenum, dan rhenium dari pemerintah yang beroperasi di wilayah Papua. Dalam izin produksi tambang Grasberg pada tahun 1996, tercantum pada AMDAL bahwa izin produksi yang diperkenankan 300 ribu/ton/hari, namun yang terjadi adalah eksploitasi tanpa batas dan kurang berpihak pada alam dan masyarakat. Pelanggaran juga dilakukan dalam hal pencemaran lingkungan dengan membuang sebagian besar limbahnya yang berkisar enam miliar ton ke sekitar lokasi tambang, atau sungai-sungai yang mengalir ke sekitar Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang memiliki status khusus dari PBB dan membuat daerah tersebut tidak cocok untuk kehidupan makhluk hidup akuatik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan amarah dari

beberapa kalangan khususnya rakyat Papua. Sadar akan gangguan tersebut, diresponlah oleh Freeport dengan memberikan kompensasi yang hanya bersifat polesan saja tanpa memiliki arti tanggung jawab sesungguhnya.

PT.Caltex Pasific Indonesia juga tidak kalah memberikan dampak negatif ke lingkungannya di Riau. Limbah yaang disumbangkan juga mencemari pertanian dan tambak warga yang mengganggu perekonomian mereka. Limbah PT Caltex telah mencemari enam sungai dan menaikkan suhu airnya hingga 80 derajat Celsius. Pada tahun 2012, perusahaan yang berubah nama menjadi PT.Cevron Pasific Indonesia ini juga menggunakan teknologi injeksi bahan kimia ke dalam tanah untuk meningkatkan produksi minyaknya yang sementara di Amerika Serikat sendiri teknologi tersebut menuai kontrversi karena dapat mencemari air masyarakat lokal. Akibat eksplloitasi sumber-sumber perminyakan tersebut, sumur-sumur warga sekitar menjadi kering dan mengharuskan warga membeli air untuk minum.<sup>21</sup>

Kasus kerusakan lingkungan yang sepertinya sulit untuk dilupakan adalah genangan lumpur yang disebabkan kelalaian dalam pengeboran minyak dan gas Lapindo Brantas di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat tinggal, tempat bekerja, tempat belajar, semuanya hilang ditelan lumpur yang pada bulan keenam dari awal kemunculannya sudah bervolume 156.000 m<sup>3</sup>. Sudah tak terhitung lagi kerugian yang ditanggung warga oleh bencana yang

---

<sup>21</sup>Aziz, "Kisah Chevron di Pengadilan Ekuador," (<http://www.katakabar.com/berita-2373-kisah-chevron-di-pengadilan-ekuator.html>)

dijadikan bencana nasional ini, belum lagi proses ganti rugi yang berjalan sangat alot.<sup>22</sup>

Masih hangat dalam ingatan, bencana asap yang melanda negeri ini di tahun 2015. Mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, sampai dengan Papua, masing-masing seperti berlomba-lomba menarik perhatian dunia dengan kepulan asapnya. Kemarau panjang dan unsur kesengajaan disinyalir sebagai penyebabnya. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, luas area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tahun 2015 sudah setara dengan 32 kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali, yaitu 2.089.911 hektar. Kerugian materil yang diakibatkan bencana inipun mencapai angka yang cukup fantastis. Di Riau saja, dalam tiga bulan sudah menyebabkan kerugian lebih dari 20 Triliun, jauh lebih besar dibanding kerugian yang diakibatkan tindakan korupsi, yang berdasarkan data yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian yang dihasilkan dari rata-rata 15 penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara tahun 2010-2014 mencapai 1,1 Triliun. Data ini menunjukkan bahwa ternyata keserakahan para pembakar hutan demi kenaikan harga lahan jika dibebaskan dengan cara dibakar lebih besar dibanding para koruptor. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti, dari 140 tersangka yang telah ditetapkan, 7 diantaranya adalah perusahaan yaitu: PT. RPP, PT. BMH, PT. RPS di Sumatra Selatan Sumsel, PT. LIH di Riau, PT. GAP, PT. MBA dan PT. ASP di Kalimantan Tengah. Fakta ini membuktikan bahwa

---

<sup>22</sup>Nor Hadi, op.cit, h.2-12.

kesadaran entitas bisnis dalam lingkungan masih sangat rendah dan hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Padahal dampak sosial yang dihasilkan tidaklah sepele. Kesehatan masyarakat dipertaruhkan, pembelajaran para siswa dan perekonomian dikorbankan, tidak hanya dalam negeri namun juga berbagi ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.<sup>23</sup>

Beberapa kasus tersebut menjelaskan kepada masyarakat secara nyata bagaimana serakahnya para entitas bisnis tanpa mempedulikan lingkungan. Kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terus muncul bukan lagi mendorong, tapi memaksa kita semua untuk memberi perhatian serius ke pelestarian lingkungan. Sebagai entitas bisnis, perusahaan wajib menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagai masyarakat harus tetap mengawasi jalannya aktivitas para perusahaan tersebut.

Diwajibkannya kegiatan CSR sesuai dengan Undang–Undang No.4 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 seharusnya mendorong para perusahaan untuk serius bertanggung jawab sosial. Namun sayangnya hal ini malah menjadikan nilai dari CSR itu sendiri hilang karena “kewajiban” itu sendiri. Pada dasarnya CSR adalah suatu kegiatan yang bersifat sukarela yang berasal dari perusahaan hasil dari kepekaan sosial dengan niat ingin meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar baik dari masyarakat ataupun lingkungan hidupnya. Namun yang terjadi, dengan adanya kewajiban ini, nilai *voluntary* tadi berubah menjadi *mandatory* yang menimbulkan kesan “asal uang habis” untuk kegiatan CSR tanpa mengutamakan perkembangan dari CSR yang telah

---

<sup>23</sup>Abraham Utama, “BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta,” 2015 (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/>).

dilakukan dan manfaat apa yang dihasilkan. Lebih parahnya lagi, banyak CSR yang dilakukan perusahaan dalam bentuk “bagi-bagi uang” yang bersifat polesan semata dan ini seperti menjadi bentuk CSR yang utama. Di Timika, Papua, uang 1% dari Freeport menjadi sebuah ketergantungan bagi masyarakatnya. Tidak jauh berbeda dengan orang Amungme, Kamoro, dan Asmat yang seolah olah tidak bisa hidup tanpa hibah tersebut. Padahal pelaksanaan CSR dalam bentuk *charity* ini seperti bukan membuat kehidupan mereka semakin sejahtera di kemudian hari malah membuat mereka semakin tidak berdaya.<sup>24</sup>

Masalah yang terjadi berkaitan dengan praktik CSR diantaranya belum adanya standar pelaksanaan CSR yang komprehensif di setiap perusahaan dan juga belum adanya kesepakatan batasan CSR oleh setiap perusahaan sehingga CSR hanya dipandang sebagai keharusan tanpa peduli esensi dari CSR itu sendiri. Seperti pemahaman CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang terkesan menyarankan namun juga mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada terseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam, dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b) yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 pasal 13 ayat 3 yang mewajibkan pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat serta dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendanaan penanganan fakir miskin berasal salah satunya

---

<sup>24</sup>Antropologkarbitan,” CSR : Berkah atau Kutukan?”, (<https://antropologkarbitan.wordpress.com/2014/03/04/csr-berkah-atau-kutukan/>)

dari dana yang disisihkan perusahaan perseroan. Perbedaan pemahaman ini yang dapat menimbulkan kerancuan dalam menentukan prioritas. Belum adanya penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan yang serius dengan CSR juga menjadi alasan ketidakseriusan perusahaan dalam melakukan CSR. Dilema akan biaya CSR yang tinggi juga membuat CSR dilakukan seadanya karena perusahaan terbentur kepentingan dengan pemakmuran pemegang saham. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan biasanya diambil dari keuntungan perusahaan yang berarti tanggung jawab tersebut lebih terkesan sebagai respon akan akibat dari operasional yang terjadi sebelumnya dan pada akhirnya tanggung jawab sosial lebih bersifat memperbaiki hubungan dengan masyarakat sedangkan pengembangan masyarakat itu sendiri menjadi hilang.

Semakin “tenar”nya tanggung jawab sosial perusahaan dikalangan bisnis, mendorong menjamurnya penelitian dari kalangan akademisi untuk meneliti apakah ada keterkaitan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja perusahaan, nilai perusahaan, produktivitas ataupun ukuran – ukuran lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cheng<sup>25</sup> yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *abnormal return*. Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditemukan oleh Li<sup>26</sup> yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan terhadap produktivitas perusahaan dari industri kimia di Amerika Serikat. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh

---

<sup>25</sup>Cheng, Megawati dan Yulius Jogi Christiawan. “ Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Abnormal Return*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.13 No.1. 2011.

<sup>26</sup>Li Sun dan Marty Stuebs, op.cit.

Crifo, Diaye dan Pekovic<sup>27</sup>, Syahnaz<sup>28</sup>, Karaye, Ishak dan Adam<sup>29</sup>, Segun, Olamide dan Ranti<sup>30</sup> yang menyimpulkan bahwa CSR dapat berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil tersebut, Hadi<sup>31</sup>, Wijayanti, Sutaryo dan Prabowo<sup>32</sup>, Tunggal dan Fachrurrozie<sup>33</sup> serta Mulyadi dan Anwar<sup>34</sup> menemukan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Masih terdapat kontradiksi antara pengaruh modal intelektual dan CSR terhadap produktivitas memotivasi peneliti untuk melanjutkan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual dan tanggung jawab sosial terhadap produktivitas perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dan 2014. Perusahaan *high profile* merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap masyarakat karena operasional mereka

---

<sup>27</sup>Patricia Crifo, Marc-Arthur Diayed dan Sanja Pekovic, "CSR related management practices and Firm Performance: An Empirical Analysis of the Quantity-Quality Trade-off on French Data," *CIRANO ( Centre Interuniversitaire de Reserche en analysis des organizations )*.2014.

<sup>28</sup>Melisa Syahnaz, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan", *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Vol.1 No.2*. 2013.

<sup>29</sup>Yusuf Ibrahim Karaye, Zuaini Ishak dan Noriah Che-Adam, " The mediating effect of stakeholder influence capacity on the relationship between corporate social responsibility and corporate financial performance", *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 164 (2014), h. 528-534.

<sup>30</sup>Segun, Abogun, Fagbemi Temitope Olamide dan Uwuigbe O. Ranti, "The Impact of Corporate Social Responsibility Expenditure on Firm Performance and Firm Value on Nigerian Bank", *Advances in Management* Vol.12 No.1.2013.

<sup>31</sup>Nor Hadi, "Interaksi Tanggung Jawab Sosial, Kinerja Sosial, Kinerja Keuangan dan Luas Pengungkapan Sosial", *MAKSIMUM* Vol 1, No. 2. 2011.

<sup>32</sup>Feb Tri Wijyanti, Sutaryo dan Muhammad Agung Prabowo, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. 2011.

<sup>33</sup>Whino Sekar Prasetyaning Tunggal dan Fachrurrozie, "Pengaruh Environmental Performance, Environmental Cost dan Pengungkapannya terhadap Firm Performance", *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No.3. 2014.

<sup>34</sup>Martin Surya Mulyadi dan Yunita Anwar, "Impact of Corporate Social Responsibility toward Firm Value and Profitability", *The Business Review, Cambridge* Vol. 19 No. 2. 2012.

berpotensi bersinggungan dengan masyarakat luas. Umumnya perusahaan-perusahaan *high profile* memiliki skala usaha besar dengan menyumbangkan residu seperti limbah cair dan polusi udara. Yang termasuk kategori perusahaan-perusahaan *high profile* adalah: perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, pariwisata, energi (listrik), kesehatan, *engineering*, pariwisata dan transportasi.<sup>35</sup> Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “ **Pengaruh Modal Intelektual dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Produktivitas Perusahaan.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Belum ada aturan khusus yang membahas perlakuan modal intelektual.
2. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh modal intelektual dengan produktivitas.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan produktivitas.
4. Masih terdapat praktik kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan *high profile*.
5. Belum adanya standar pelaksanaan CSR yang komprehensif di setiap perusahaan atau perbedaan aturan CSR di beberapa kementerian.

---

<sup>35</sup>David Hackston dan Markus J. Milne, “Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 9 No. 1, 1996, h. 77-108, h. 87.

6. Belum adanya penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan yang serius dengan CSR.
7. Praktik CSR masih bersifat responsif dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini meneliti pengaruh modal intelektual, dan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap produktivitas perusahaan yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 dan 2014. Produktivitas yang diteliti adalah produktivitas dari perusahaannya. Perusahaan-perusahaan *high profile* dipilih karena mereka masih menjadi sorotan utama masyarakat yang disebabkan operasional yang sangat sensitif dengan kepentingan luas. Dan perusahaan-perusahaan tersebut juga termasuk yang paling banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Pembatasan ini juga dilakukan karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara modal manusia terhadap produktivitas perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara modal fisik terhadap produktivitas perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara modal struktural terhadap produktivitas perusahaan?

4. Apakah terdapat pengaruh antara modal intelektual terhadap produktivitas perusahaan?
5. Apakah terdapat pengaruh antara tanggung jawab sosial terhadap produktivitas perusahaan?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis : memberikan bukti empiris baru mengenai pengaruh modal intelektual dan tanggung jawab sosial terhadap produktivitas perusahaan *high profile* di Indonesia.
2. Kegunaan praktis : menjadi bahan pertimbangan untuk menilai modal intelektual dan tanggung jawab sosial di perusahaan *high profile* untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.